

Strategi Hegemoni Tiongkok Melalui Belt Road Initiative : Implikasi Terhadap Tata Kelola Dan Keamanan Di Indonesia

Andikha Sinombor^{a,1}, Jelly Runturambi^{b,2}, Riris Simaremare^{c,3}

^{a,b,c} Prodi Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia,

e-mail: andikasinombor2006@gmail.com, ¹jellintrambi@gmail.com, ²riris24simaremare@gmail.com, ³

Correspondence author: andikasinombor2006@gmail.com

Keywords: ABSTRACT

Belt and Road Initiative;
China;
hegemony;
economy;
politics;
Indonesia;
international security

This article analyzes China's strategy in hegemonizing the Indonesian region through the implementation of the Belt and Road Initiative (BRI). The method used in this study is descriptive-qualitative with a library research/literature review approach. This article examines the BRI and its concepts with a focus on Antonio Gramsci's concept of hegemony. The results of the study indicate that the BRI functions as a strategic instrument for China to expand its political and economic influence through large-scale investments in the global infrastructure sector. This program enhances international connectivity, accelerates trade, and creates employment opportunities in partner countries. However, concerns remain regarding the debt trap and regional economic dependency in Indonesia. This study concludes that Indonesia explicitly acknowledges the magnitude of China's power and influence over economic and political dynamics within international security.

1. PENDAHULUAN

Tiongkok kini menjadi salah satu kekuatan global yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Salah satu kebijakan strategis yang mencerminkan ambisi global tersebut adalah *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 (Chen, J, 2020). Program ini bertujuan untuk membangun jaringan konektivitas ekonomi global melalui investasi, perdagangan, serta pembangunan infrastruktur lintas negara yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam konteks Indonesia, BRI menjadi bagian penting dari kerja sama ekonomi dan politik luar negeri, di mana berbagai proyek pembangunan seperti pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur energi dilaksanakan dengan dukungan investasi Tiongkok. Namun, dibalik manfaat ekonomi yang ditawarkan, terdapat dimensi strategis yang menunjukkan upaya hegemoni Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi hegemoni Tiongkok melalui BRI serta implikasinya terhadap tata kelola dan keamanan nasional di Indonesia.

Secara historis, *Belt and Road Initiative* (BRI) terinspirasi dari Jalur Sutra Kuno (*Silk Road*) (Summers, T., 2016) yang menjadi jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa pada masa lampau. Dalam konteks modern, BRI dihidupkan kembali oleh Tiongkok sebagai proyek besar untuk memperluas jaringan ekonomi global melalui dua jalur utama, yaitu *Silk Road Economic Belt* (jalur darat) dan *21st Century Maritime Silk Road* (jalur laut). Indonesia memiliki posisi strategis dalam inisiatif ini karena terletak di persimpangan rute perdagangan internasional, khususnya di kawasan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan (Summers, T 2016). Melalui kerja sama BRI, Tiongkok berupaya memperkuat hubungan ekonomi dan politiknya dengan Indonesia, terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, transportasi, dan energi. Namun, dibalik upaya tersebut, terdapat kepentingan geopolitik yang lebih luas, dimana BRI tidak hanya menjadi sarana kerja sama

ekonomi, tetapi juga alat diplomasi dan ekspansi pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Chen, J., 2020).

Kehadiran *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, terutama dalam bidang tata kelola pemerintahan dan keamanan nasional (Saraswati, N. M. V., 2020). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa proyek BRI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai sarana perluasan pengaruh strategis Tiongkok. Menurut studi yang dilakukan oleh Jones & Zeng (2019), BRI merupakan platform yang memperkuat keterhubungan ekonomi sekaligus menciptakan dependensi politik bagi negara mitra. Sementara itu, penelitian Hurley, Morris & Portelance (2018) menegaskan bahwa negara penerima BRI berpotensi mengalami tekanan dalam tata kelola karena ketergantungan pada investasi dan pembiayaan Tiongkok. Dalam konteks keamanan, Li & Wong (2020) menjelaskan bahwa ekspansi ekonomi melalui BRI sering berkaitan dengan peningkatan pengaruh geopolitik Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Temuan-temuan akademik tersebut memperkuat pemahaman bahwa hadirnya BRI di Indonesia tidak sekadar membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk dinamika baru dalam pengelolaan pemerintahan dan strategi keamanan nasional. Berdasarkan diskursus *scholars* di atas, masih belum ada yang melihat dampak keamanan Indonesia dari adanya *Belt and Road Initiative* (BRI). Jadi penelitian ini akan melihat bagaimana dampak keamanan Indonesia dari kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok? Sumbangan utama dari penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam diskursus tentang politik ekonomi Indonesia dalam percaturan global.

2. LANDASAN TEORITIK

Teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci menjelaskan bahwa dominasi suatu negara tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pengaruh ideologis, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks BRI, hegemoni Tiongkok tampak dari kemampuannya membangun kesepakatan atau *consent* dari negara-negara mitra, termasuk Indonesia, melalui kerja sama ekonomi dan pembangunan yang tampak saling menguntungkan. Namun, dibalik itu terdapat upaya sistematis untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok sehingga menciptakan ketergantungan terhadap modal dan kebijakan luar negeri kedua negara. Dengan demikian, BRI dapat dipahami sebagai instrumen hegemoni modern yang digunakan untuk memperkuat posisi Tiongkok dalam tatanan geopolitik dan domestik.

Dalam perspektif Gramsci, dominasi ekonomi dan dominasi politik merupakan dua pilar awal yang memperkuat posisi negara hegemoni. Dominasi ekonomi muncul melalui investasi, pinjaman, perdagangan, industri (Gramsci, 1971). Negara yang menerima modal dan proyek pembangunan dari negara dominan akan masuk ke dalam jaringan ketergantungan ekonomi yang sulit dilepaskan. Sementara itu, dominasi politik muncul dalam bentuk kekuasaan, pengaruh, ketergantungan, tekanan. Kedua bentuk dominasi ini saling berkaitan dan menjadi dasar terbentuknya kekuasaan internasional. Namun, Gramsci menekankan bahwa dominasi saja belum menjadi hegemoni. Hegemoni baru terjadi ketika dominasi ekonomi dan politik tersebut kemudian memperoleh legitimasi budaya dan ideologis (Gramsci, 1971). Pada tahap inilah negara yang lebih lemah menerima dominasi tersebut sebagai sesuatu yang normal dan menguntungkan. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai ruang utama tempat kekuasaan hegemonik bekerja, bukan sekadar instrumen material.

Hegemoni BRI itu bagian dari koprasasi kekuasaan itu berlangsung (Budaya). Bagi Gramsci, tahapan kekuasaan menjelaskan bahwa hegemoni itu dari dominasi ekonomi (investasi, pinjaman, perdagangan, industri) dan dominasi politik (kekuasaan, pengaruh, ketergantungan, tekanan), yang membentuk kekuasaan hegemoni. Maka dalam konteks kekuasaan itu hegemoni yang dimasukan pada budaya Bukan dimasukkan pada dominasi ekonomi dan dominasi politik (Pratama, F, 2023). Dominasi Tiongkok dalam BRI terlihat dari kemampuannya mengatur struktur investasi, menentukan skema pembiayaan, dan mengendalikan jalannya proyek di negara-negara mitra (Hurley, J., Morris, S., & Portelance, G. 2018). Tiongkok menyediakan modal dalam jumlah besar, namun modal tersebut disalurkan melalui lembaga

keuangan Tiongkok, perusahaan BUMN Tiongkok, dan kontraktor Tiongkok, sehingga kehadiran ekonomi Tiongkok semakin mengakar di negara penerima. Dominasi ini bukan hanya berbentuk ekonomi, tetapi juga geopolitik karena negara yang menerima proyek BRI cenderung menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap harmonis dengan kepentingan Tiongkok. Dengan penguasaan teknologi, tenaga kerja, dan pembiayaan utama, Tiongkok menempatkan dirinya sebagai aktor dominan sekaligus pengarah perkembangan ekonomi negara mitra (Hurley, J., Morris, S., & Portelance, G. 2018).

Dominasi ini merupakan Ketika instrumen ekonomi dan politik bekerja bersamaan, terbentuklah hegemoni BRI, yaitu kondisi dimana proyek-proyek BRI menjadi alat untuk menciptakan tatanan ekonomi-politik yang mengatur hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Hegemoni BRI terjadi ketika investasi dan proyek infrastruktur Tiongkok diterima sebagai solusi utama pembangunan, narasi kerja sama “*win-win*” diterima sebagai kebenaran, dan kebijakan nasional mengikuti arah yang selaras dengan kepentingan Tiongkok. Hegemoni ini menciptakan “tatan kelola baru” (*new governance order*) dimana Tiongkok menjadi pemberi arah, penyedia modal, sekaligus penentu standar dalam proyek strategis di Indonesia (Fitriani, E. 2021)

Hegemoni BRI tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik, tetapi juga mencakup dimensi keamanan. Ketika Tiongkok menguasai sektor industri strategis, logistik, energi, dan jalur perdagangan melalui proyek BRI, Indonesia menghadapi tantangan baru terhadap kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Dengan demikian, analisis terhadap hegemoni BRI menjadi penting karena menggambarkan bagaimana Tiongkok tidak hanya membangun infrastruktur atau investasi, tetapi juga membangun struktur kekuasaan dan ketergantungan yang memengaruhi posisi strategis Indonesia di masa depan. Struktur kekuasaan ini memungkinkan akan menjadi fondasi terciptanya hegemoni Tiongkok dalam kerangka BRI (Gill, S. (Ed.), 1990).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam dinamika ekonomi-politik, relasi kuasa, dan konstruksi wacana yang membentuk praktik kebijakan luar negeri Tiongkok dan respons Indonesia. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan wacana kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana narasi BRI, pembangunan infrastruktur, kerja sama investasi, serta isu keamanan dikonstruksikan dalam dokumen resmi, pidato elite politik Tiongkok dan Indonesia, serta laporan institusi internasional. Sehingga penelitian tidak hanya mengidentifikasi isi kebijakan, tetapi juga menelaah relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di balik ekspansi ekonomi Tiongkok di Indonesia (Fitriani, E. 2021)

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan pemberitaan media. Literatur ilmiah meliputi buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga penelitian terkait BRI dan hegemoni Tiongkok. Dokumen kebijakan mencakup MoU atau kerja sama Indonesia–Tiongkok di sektor infrastruktur, laporan BRI, dokumen Partai Komunis China, serta laporan organisasi internasional seperti World Bank, ADB, dan ILO. Media seperti The Guardian, BBC, South China Morning Post, Kompas, dan The Jakarta Post digunakan untuk melacak perkembangan isu tata kelola, investasi, serta keamanan nasional terkait proyek BRI di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang bertujuan memahami konteks kebijakan ekonomi-politik China, dinamika hubungan Indonesia–China, serta perkembangan BRI di berbagai sektor strategis Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahap awal analisis meliputi reduksi dan kategorisasi data berdasarkan tema seperti strategi ekonomi-politik Tiongkok melalui BRI, implementasi proyek BRI di Indonesia, dampaknya terhadap tata kelola, dan implikasi keamanan. Selanjutnya, peneliti menelaah bagaimana narasi kekuasaan, dominasi ekonomi, dan strategi hegemonik Tiongkok direpresentasikan dalam dokumen kebijakan maupun pemberitaan mengenai proyek BRI di Indonesia.

4. HASIL DAN ANALISIS

Implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia terutama berfokus pada pengembangan infrastruktur strategis dan kawasan industri yang mendukung visi Jalur Sutra Maritim abad ke-21 yang digagas Tiongkok. Indonesia diposisikan sebagai negara kunci di kawasan Asia Tenggara karena letaknya berada pada jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Beberapa proyek utama BRI di Indonesia meliputi Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), Kawasan Industri Morowali (IMIP) sebagai pusat hilirisasi nikel, Kawasan Industri Weda Bay, pembangunan PLTU dan infrastruktur energi, revitalisasi pelabuhan, serta beberapa investasi strategis dalam sektor transportasi, logistik, dan manufaktur. Investasi Tiongkok ini umumnya didukung oleh pinjaman dan pembiayaan dari lembaga keuangan Cina seperti *China Development Bank* dan *Exim Bank of China*, sehingga menciptakan hubungan ekonomi jangka panjang antara kedua negara.

Karakter utama investasi Tiongkok dalam kerangka BRI adalah orientasinya pada sektor industri berat, energi, dan konektivitas transportasi, serta penggunaan model pembiayaan yang menempatkan perusahaan BUMN Tiongkok sebagai aktor dominan. Selain itu, banyak proyek dilakukan dengan skema EPC (*Engineering, Procurement, Construction*) yang memastikan bahwa tenaga ahli, teknologi, dan kontraktor utama berasal dari Tiongkok. Hal ini membuat struktur investasi BRI bukan sekadar pembiayaan pembangunan, tetapi instrumen yang memperluas kehadiran ekonomi Tiongkok di Indonesia melalui penguasaan rantai pasok industri strategis, khususnya nikel, baja, dan energi.

Tabel 1. Proyek Pembangunan Indonesia Yang Didukung China

NO	Nama Proyek	Sektor	Lokasi
1	Kereta cepat	Transportasi	Jakarta-bandung
2	Kawasan industri morowali (IMIP)	Industri dan nikel	Sulawesi tengah
3	Kawasan Industri Weda Bay (IWIP)	Industri nikel & batara	Maluku utara
4	PLTU Batang	Energi (batu bara)	Jawa tengah
5	PLTU Java 7	Energi	Jawa barat
6	Pelabuhan Kuala Tanjung	Maritim & logistik	Sumatra utara
7	Pelabuhan Bitung	Maritim	Sulawesi utara
8	Smelter Bauksit & Tembaga	Industri pengolahan	Kalimantan&Sulawesi
9	PLTA Kayan	Energi (air)	Kalimantan utara
10	Infrastruktur Kawasan Tambang	Jalan & logistik	Morowali, Weda Bay
11	Proyek Pariwisata	Pariwisata	Bali, Manado, Danau Toba
12	Jaringan Telekomunikasi Huawei & ZTE	Teknologi digital	Nasional

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Berbagai Sumber

Keberadaan proyek-proyek BRI secara ekonomi memberikan manfaat seperti percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, serta penguatan kapasitas logistik nasional. Namun, dari perspektif ekonomi politik, proyek BRI juga menghadirkan tantangan struktural yang perlu diperhatikan. Pembiayaan proyek yang bergantung pada utang luar negeri meningkatkan risiko beban fiskal dan ketergantungan finansial terhadap Tiongkok. Selain itu, dominasi perusahaan Tiongkok dalam teknologi, tenaga ahli, dan rantai pasok industri strategis seperti nikel dan baja dapat mengurangi kapasitas Indonesia untuk mengembangkan industri nasional secara mandiri. Di sisi politik, keterlibatan Tiongkok dalam proyek-proyek strategis meningkatkan pengaruh Beijing dalam pembuatan kebijakan, terutama dalam regulasi investasi, penentuan skema kerja sama, dan pengaturan industri. Hal ini menciptakan posisi tawar yang tidak seimbang, dimana Indonesia

sering kali menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan ekspektasi investor Tiongkok demi menjaga keberlanjutan proyek dan stabilitas kerja sama bilateral.

Jika ditinjau melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, pengaruh Tiongkok melalui BRI tidak hanya bersifat material tetapi juga ideologis. Hegemoni Tiongkok terbentuk ketika Indonesia menerima kehadiran dan dominasi ekonomi Tiongkok sebagai hal yang wajar dan menguntungkan melalui narasi pembangunan, modernisasi, dan percepatan industrialisasi. Dalam konteks ini, Tiongkok tidak perlu menggunakan paksaan, karena pengaruhnya dijalankan melalui mekanisme ekonomi (investasi, pinjaman, dan pembangunan infrastruktur) dan legitimasi politik (diskursus *win-win cooperation*, kerja sama strategis, dan diplomasi ekonomi). Ketergantungan yang muncul dari proyek BRI menjadikan Tiongkok sebagai aktor utama dalam penataan ekonomi Indonesia, sehingga membentuk kekuasaan hegemonik yang memengaruhi orientasi strategis Indonesia dalam jangka panjang.

Hegemoni Tiongkok melalui BRI juga berkaitan erat dengan tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia. Masuknya investasi besar Tiongkok pada sektor industri strategis berpotensi memberikan Tiongkok kendali terhadap rantai pasok mineral penting seperti nikel yang merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik. Kontrol ini dapat menjadi leverage politik dalam situasi geopolitik yang lebih luas. Selain itu, kedekatan Indonesia-Tiongkok dalam kerja sama ekonomi sering dihubungkan dengan sensitivitas isu Laut Cina Selatan, di mana ambisi geopolitik Tiongkok dapat memengaruhi posisi diplomatik Indonesia (Li, M. 2020). Kehadiran perusahaan dan tenaga kerja Tiongkok dalam jumlah besar juga memunculkan ketegangan sosial serta persepsi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Dalam konteks keamanan energi, proyek-proyek energi yang bergantung pada teknologi dan pendanaan Tiongkok berpotensi menimbulkan risiko jika terjadi ketegangan politik atau konflik di masa depan.

Dengan demikian, proyek-proyek Tiongkok dalam kerangka BRI bukan sekadar program pembangunan, melainkan instrumen yang berperan dalam membentuk struktur kekuasaan baru di Indonesia. Integrasi proyek BRI dengan kepentingan ekonomi-politik dan geopolitik Tiongkok memunculkan potensi ancaman keamanan bagi Indonesia, baik dalam bentuk ketergantungan ekonomi, pengaruh politik, maupun risiko strategis terhadap industri dan sumber daya nasional. Oleh karena itu, analisis hegemoni Tiongkok dalam konteks BRI menjadi penting untuk memahami bagaimana proyek-proyek tersebut dapat menggeser keseimbangan kekuatan dan mengurangi otonomi strategis Indonesia. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi mitigasi dan memastikan bahwa kerja sama dengan Tiongkok tetap memberikan keuntungan tanpa mengorbankan keamanan nasional.

4. KESIMPULAN

Implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI) di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur bukan hanya instrumen pembangunan, tetapi juga medium bagi Tiongkok untuk membangun pengaruh struktural melalui hegemoni ekonomi-politik. Ketika investasi, proyek strategis, dan pembiayaan dari Cina diterima sebagai solusi utama pembangunan, maka terbentuklah kondisi dimana narasi BRI seperti *win-win cooperation*, percepatan pembangunan, dan konektivitas ekonomi mendominasi ruang kebijakan nasional. Hegemoni ini bekerja secara halus melalui penerimaan ide, ketergantungan modal, serta penyesuaian kebijakan domestik Indonesia yang semakin selaras dengan kepentingan Tiongkok. Oleh karena itu, BRI tidak hanya menciptakan konektivitas fisik, tetapi juga menciptakan struktur ketergantungan yang memengaruhi arah pembangunan jangka panjang Indonesia.

Di sisi lain, hegemoni BRI juga membawa implikasi terhadap aspek keamanan dan kedaulatan nasional. Ketika Tiongkok semakin menguasai sektor strategis seperti energi, logistik, pelabuhan, dan teknologi melalui proyek-proyek BRI, Indonesia menghadapi tantangan baru berupa potensi ketergantungan ekonomi yang berdampak pada manuver diplomasi dan strategi keamanan regional. Struktur kekuasaan baru ini menempatkan Tiongkok sebagai aktor dominan dalam tatanan ekonomi-politik Indonesia, sehingga membuka risiko tekanan politik, kontrol standar pembangunan, dan pengurangan kapasitas negara dalam menentukan arah kebijakan secara independen. Dengan demikian,

analisis terhadap hegemoni BRI menjadi penting untuk memahami bagaimana pembangunan infrastruktur dapat berubah menjadi instrumen yang memengaruhi kedaulatan, posisi strategis, dan kebijakan nasional Indonesia di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Jianfu. 2020. Tension and Rivalry: The 'Belt and Road' Initiative, Global Governance, and International Law. *The Chinese Journal of Comparative Law*, Vol. 8 No. 1 pp. 177–196
- Du, J., & Zhang, Y. (2018). Does One Belt One Road Initiative Promote Chinese Overseas Direct Investment?. *China Economic Review*, 47, 189–205.
- Ferdinand, P. (2016). Westward ho—the China dream and 'one belt, one road': Chinese foreign policy under Xi Jinping. *International Affairs*, 92(4), 941–957.
- Fitriani, E. (2021). Implementasi Belt and Road Initiative terhadap Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 22–35.
- Gill, S. (Ed.) (1990). *American Hegemony and the Trilateral Commission*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Hurley, J., Morris, S., & Portelance, G. (2018). Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective. *Center for Global Development*. Vol. No.
- Jones, L., & Zeng, J. (2019). Understanding China's "Belt and Road Initiative": Beyond "Grand Strategy" to a State Transformation Analysis. *Third World Quarterly*, 40(8), 1415–1439. doi:10.1080/01436597.
- Kcic. (2023). Tentang Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Pt Kereta Cepat Indonesia–China. <https://Kcic.Co.Id> Diakses pada link <https://Kcic.Co.Id>.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). Perkembangan Investasi PMA China di Indonesia. Diakses dari situs resmi BKPM. Diakses Pada Link <https://share.google/v47Q1egfuA6FrzJxF>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Kemenko Perekonomian. Diakses pada link <https://share.google/UgrBK9NtGqneKc4A>
- Li, M. (2020). The Belt and Road Initiative: geo-economics and Indo-Pacific security competition. *International Affairs*, 96(1), 169–187. doi:10.1093/ia/iiz240.
- National Development and Reform Commission (NDRC) of China. (2015). *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*. Beijing: NDRC.
- Saputro, Pradono Budi.(2024).KOMPLEKS KEAMANAN REGIONAL INDO-PASIFIK SEBAGAI FAKTOR PEMICU PEMBENTUKAN AUKUS.Journal Publicuho, Volume 7 No 4, pp.2091 -2110
- Pratama, F. (2023). Strategi China melalui BRI dan Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Politik Global*, 5(1), 45–60.
- Saraswati, N. M. V. (2020). Menilik Perjanjian Indonesia–Cina dalam Kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(2), 55–72.
- Siregar, J., & Manurung, R. (2022). Dampak Investasi Asing China terhadap Sektor Industri di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(3), 301–315.
- Summers, T. (2016). China's 'New Silk Roads': Sub-national regions and networks of global political economy. *Third World Quarterly*, 37(9), 1628–1643.
- World Bank. (2020). *Economic Update: Infrastructure Investment in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.
- Yu, Hong. 2017. China's Belt and Road Initiative and Its Implications for Southeast Asia. *Asia Policy*National Bureau of Asian Research, No. 24 (JULY 2017), pp. 117-122